

TESIS
EVALUASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR

oleh :

HASYIM
NIM. 0921101013

Dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal 7 Juli 2011
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing



Dr. Imam Hanafi.,S.Sos.,M.Si
Ketua



Prof. Dr. Ir. Soemarno.,MS
Anggota

Anggota

Malang,

Universitas Brawijaya
Program Pascasarjana
Direktur,



Prof. Dr. Ir. Soemarno.,MS
NIP. 19550817 198003 1 003

JUDUL TESIS:

**EVALUASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR**

Nama Mahasiswa : H a s y i m
NIM : 0921101013
Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan
Pembangunan

Komisi Pembimbing :

Ketua : Dr. Iman Hanafi, S.Sos., MS
Anggota : Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Dr.Ir.Abdul Wahib Muhaimin,MS
Dosen Penguji 2 : Prof.Dr. Andi Yuli Gani, M.Si

Tanggal Ujian :
SK Penguji

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Karya tulis ini saya susun atas bimbingan 2 dosen pembimbing saya

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang,

Mahasiswa,



Nama : Hasyim
NIM : 0921101013
PS : PSLP
PPSUB

RINGKASAN

HASYIM, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Juni 2011.
Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Jawa Timur; Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Imam Hanafi, S.Sos., MS,
Anggota: Prof.Dr.Ir. Soemarno, MS.

Bahwa makan merupakan hak dasar bagi setiap manusia agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kelaparan karena tidak ada makanan tentu sangat mengesankan bagi yang merasakannya, tentu aib bagi masyarakat sekitarnya, dan bagi pemerintah tentu suatu ironi. Dan jika kelaparan itu terjadi massal di tengah-tengah suatu kemakmuran, maka hal itu tentulah merupakan sebuah cacat peradaban. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masalah pangan ini telah sekian lama menjadi perhatian dan kepedulian para ahli dan pemerintah di setiap negara di belahan dunia ini karena disadari benar bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang paling utama. Bahwa ketersediaan kebutuhan pangan merupakan komponen dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat, kuat dan berkualitas.

Memperhatikan betapa pentingnya pangan yang pemenuhannya diakui sebagai bagian dari hak azasi individu setiap orang, maka wajar jika setiap pemerintahan di suatu negara atau wilayah selalu berusaha mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya, sebab sejarah telah membuktikan bahwa suatu negara atau wilayah yang sukses dalam melakukan kemandirian pembangunannya, sedikit banyak kesuksesan tersebut ditentukan oleh keberhasilannya dalam bidang pembangunan ketahanan pangannya.

Mengacu pada peran dan tanggung jawab yang harus diemban setiap pemerintah daerah di Indonesia dalam melaksanakan kebijakan ketahanan pangannya, maka penelitian ini mengevaluasi kebijakan ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi substansi, implementasi, hasil dan dampak dari kebijakan ketahanan pangan Pemkab.Ponorogo tahun 2005-2010 ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, konsumsi pangan, distribusi pangan, diversifikasi pangan, penelitian dan pengembangan serta pembinaan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitatif research*) dengan maksud untuk menemukan, mengetahui, memahami, mendalami, menganalisa, mengungkapkan, dan menggambarkan (deskripsi) suatu gejala atau fakta secara holistik-kontekstual, sistimatis, dan akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diteliti dengan fakta-fakta di lapangan melalui pengumpulan data dari latar alami berupa tulisan, ungkapan, dan perilaku manusia yang diamati dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Sumber data/informasi dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kondisi visual di lapangan, informasi langsung dari masyarakat dan aparat pemerintah melalui wawancara dan kuesioner. Informan kunci dalam penelitian ini dipilih secara purposive dengan pertimbangan yang bersangkutan mengerti, kompeten, menguasai permasalahan, memiliki data/informasi yang benar dan akurat, bersedia memberikan data/informasi yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari survey instansional berupa peraturan-peraturan tertulis, laporan atau dokumen resmi dari berbagai

instansi terkait dan sumber-sumber lainnya. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan secara jelas, akurat dan komprehensif berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo pada bulan Januari sampai bulan Maret 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, konsumsi pangan, distribusi pangan, diversifikasi pangan, penelitian dan pengembangan serta pembinaan sumber daya manusia, maka secara umum kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Ponorogo selama ini sudah berada pada arah yang baik dan benar sekalipun dalam implementasinya masih menemui banyak kendala dan tantangan. Dari aspek ketersediaan pangan dapat disimpulkan cukup bagi penduduk bahkan mengalami surplus rata-rata 60 persen setiap tahunnya sepanjang kurun waktu 2005-2010. Akan tetapi ditinjau dari aspek distribusi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga penduduk dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau, masih menjadi masalah yang belum bisa di atasi secara optimal. Faktor sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai menjadi hambatan. Pola konsumsi yang tepat dan efisien untuk mencegah pemborosan dalam pola konsumsi pangan rumah tangga serta pola pemanfaatan pangan yang memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, berimbang, bergizi, aman dan halal masih menemui kendala terutama di daerah pedesaan. Dari aspek diversifikasi konsumsi diwujudkan melalui gerakan penganekaragaman makanan lokal. Dalam hal penelitian dan pengembangan dengan bekerja sama Instansi terkait, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta dilakukan kegiatan sertifikasi penganekaragaman, cita rasa, dan kandungan gizi, serta keamanan pangan, penelitian Padi Unggul Indonesia dan kacang-kacangan, pengkajian kerawanan pangan di beberapa wilayah terpencil, bantuan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan dan pemasyarakatan diversifikasi konsumsi pangan penduduk. Dalam hal pembinaan sumber daya manusia pertanian, kebijakan yang ditempuh adalah program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada para petani. Sedangkan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparat instansi terkait dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara kontinyu, baik ditingkat regional maupun nasional.

Bahwa untuk menciptakan ketahanan pangan wilayah yang tangguh, maka gerakan kembali ke sawah dan intensifikasi pekarangan serta pemanfaatan potensi lahan-lahan marginal disertai penerapan konservasi harus dijadikan sebagai gerakan bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo ke depan. Dalam pada itu perbaikan sarana infrastruktur dan transportasi harus terus dilakukan guna mendukung pembangunan pertanian yang maju dan tangguh. Sementara itu Kantor Ketahanan Pangan yang ada saat ini perlu ditingkatkan statusnya menjadi Badan Ketahanan Pangan Daerah sehingga bisa lebih berperan dan berfungsi secara maksimal. Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati hendaknya berupaya mencegah terjadinya konversi lahan sawah untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana fisik serta terus menjalin kerjasama yang sinergis dengan Dolog sebagai penyangga pangan terdepan di daerah.

SUMMARY

Hasyim, Post graduate Program Brawijaya University, June 2011. The Evaluation of Food Security Policy of District Government of Ponorogo, East Java: Supervisor Committee, Head: Dr. Imam Hanafi, S.Sos., MS, Member: Prof.Dr.Ir. Soemarno, MS

Consuming is a basic need for every human to maintain their lifetime. Starvation because lack of foods is really a tragic for those who feel it, is a disgrace for the society surrounding, and is an ironic for the government. If starvation then is massively happen among prosperity, so it can be said as a flawed of civilization, therefore, there is not doubt that this problem has been becoming an attention and care of some experts and government in every country over the world because it is truly realized that food is the main basic component to create a healthy, powerful, and qualified human resource.

Concerning with how important food that admitted as the human right of individual, it is natural that every government in one country or region always try to develop food security as the first foundation of developing others sector, because it had been proved by the history that one country or region which is success in running its independence development, a bit of the success is determined by its success in developing food security.

Refer to the role and responsible that carried out by every regional government in Indonesia in applying the food security policy, this research evaluated the food security policy of district government of Ponorogo East java. The objective of the research was to evaluate the substance, implementation, result and impact of food security policy of district government of Ponorogo year 2005-2010 that discussed from the aspect of food availability, food consuming, food distribution, and food diversification, research, development, and human resource training. The research used qualitative approach in order to find, to know, to understand ,to deepen, to analyze, to discover, and to describe a tendency or a fact systematically, accurately, and holistically contextual. It was about the relationship between phenomena that discussed with the empirical facts by collecting the data from natural background in the form of written text, statement, and human behavior that observed by positioning the researcher as the key instrument. The source of the data/information in this research consists of primary and secondary data. Primary data obtained from the visual condition in the field, direct information from the society and government officer by taking interview and giving questionnaire. The key informants in this research were selected purposively by considering that they understand, competence, knowing the problem well, having the accurate and valid data/information, and willing to give the data/information that relevant to the research. Secondary data of this research obtained from institutional survey in the from of written rules, formal report or document from any institutions and others sources. The analysis used in this research was descriptive research that gave the description about the

problem clearly, accurately, and comprehensively based on the collected data for either primary or secondary data. This research held in District Ponorogo start from January to March 2011.

The result of the research, in general shown that from the aspect of food availability, food consuming, food distribution, and food diversification, researc, development, and human resource training, the policy made by the district government of Ponorogo had already been good and correct although in the implementation there is still the obstacle and problem. From the aspect of the availability of food is concluded that it is enough for the society even there is a surplus with the average 60 percentage for every year during 2005-2010. But from the aspect of the effective and efficient food distribution, to guarantee all the people can get the food with sufficient number and quality during the period with the achievable cost, is still becoming unsolved problem because of improper transportation facilities. It is the same with the precise and efficient consuming system to prevent the wasful in family hood consuming system and the food beneficial system that fulfill the quality norm, diversity, nutritious, safe, and permitted, is still becoming a problem particularly in the urban area. The aspect of diversification is done in two ways; producing diversification and consuming diversification. Consuming diversification is applied by implementing program diversifying local food. In term of research and development by cooperating with certain institution, research organization, college, and private institution, certification of diversification is conducted. It is about taste, nutrition content, and food safety, research on excellent rice plant and bean of Indonesia, study on unsafe food in some isolated regions, agriculture facilities aid, developing and socializing the people's food consuming diversification. In term of training the human resources, the policy made is education development program, training and elucidating the farmer. For the developing government officer's quality, educating and training program is made both regionally and nationally.

To create a strong food security of a region, back to the rice field program and yard intensification and use the marginal land with the implementation of conserving, are the next programs of district government of Ponorogo. Therefore, transportation and infrastructure improvement must be continued in order to support advanced and strong agriculture development. Meanwhile, the status of currend food security office is needed to be improved become Region Food security Department so it can maximally play its role.